

Bisnis dan Wirausaha Desa Menuju Kemandirian Ekonomi Kerakyatan di Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga

Tri Wahyuni

Universitas Negeri Semarang
triwahyuniketiga@gmail.com

Abstrak

Ekonomi kerakyatan merupakan suatu bentuk kemerdekaan masyarakat dalam semua proses ekonomi. Bukan lagi negara atau kapitalis yang berkuasa, tetapi ada kuasa jenis baru yang diciptakan agar mampu mencapai kesejahteraan. Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga memiliki potensi wirausaha desa yang hingga sekarang banyak menjadi sumber pendapatan masyarakat. Penelitian ini merupakan hasil pengamatan dan pendalaman yang cukup lama. Pendalaman data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada beberapa keluarga yang fokus mengolah gula jawa. Pengolahan gula jawa dikenal dengan *nderes*. Seluruh proses pengolahan gula jawa dikerjakan pribadi, tidak ada campur tangan elit lokal atau “tangan” pemodal besar. Masyarakat menjadi tidak terlalu bertumpu pada negara atau perusahaan. Dengan rantai perdagangan yang mandiri, mereka dapat menentukan kuasa pasar. Meskipun beberapa *juragan* yang sedikit bermain, tetapi bagi masyarakat desa itu tidak mengeksplotisasi seperti kebijakan perusahaan kapital. Alat produksi, tenaga dan wilayah pertanian menjadi hak dan kuasa penuh yang dikendalikan oleh masing-masing petani. Bentuk bisnis desa ini yang sedikit banyak mampu menyumbang kemandirian ekonomi kerakyatan.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Wirausaha, Mrebet Purbalingga.

Abstract

People's economic is a form of community independence in all economic processes. It is no longer the ruling state or capitalist, but there is a new kind of power created to be able to prosper. Pengalusan Village, Mrebet Subdistrict, Purbalingga has the potential of village entrepreneurship which until now has been a source of community income. This research is the result of observation and a long enough study. Deepening of the data is done by conducting interviews with several families that focus on processing palm sugar. Java sugar processing is known as nderes. The whole process of processing sugar is done privately, there is no interference from the local elite or "hands" of big investors. Society

has become less dependent on the state or company. With independent trade chains, they can determine market power. Although some skipper play a little, but for the villagers it does not exploit the policy of capital companies. The means of production, power and agricultural territory become the full rights and powers controlled by each farmer. This form of village business is more or less capable of contributing to people's economic independence.

Keywords: *People's economic, Entrepreneurship, Mrebet Purbalingga.*

Pendahuluan

Cikal bakal ekonomi di Indonesia bukan bentuk kapitalis yang hari ini menjadi penguasa kehidupan sosial ekonomi bangsa. Secara histori masyarakat Indonesia lebih mengenal perdagangan lokal yang sekarang masih dapat di lihat di pasar tradisional. Bahkan jika dilihat lebih lama, masyarakat awalnya tidak menggunakan alat penukaran berupa mata uang, melainkan barter. Sistem perdagangan atau ekonomi tersebut yang sebenarnya dicita-citakan oleh pendiri bangsa, yaitu terbentuk suatu kemandirian ekonomi yang tidak bertumpu pada kekuasaan global. Bangsa Indonesia dibayangkan suatu saat tidak menunggu hasil produksi luar karena dengan kondisi sumber daya yang cukup melimpah.

Sejarah cita-cita bangsa Indonesia dalam hal ekonomi mulai dimunculkan sejak kemerdekaan diproklamasikan. Hal tersebut tertuang dalam sila keempat Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila tersebut menjadi landasan konstitusional negara dalam asas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi merupakan suatu bentuk khas bangsa Indonesia untuk menunjukkan karakteristik dan cita-cita bangsa. Sila keempat dijadikan landasan dalam pasal 33 UUD 1945 yang kemudian pada Sidang Tahunan MPR 2002 menjadi landasan atas ekonomi kerakyatan. Selain itu, landasan ekonomi kerakyatan juga berasal dari pasal 27 dan pasal 34, yang menyatakan peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan yaitu: mengembangkan koperasi dan BUMN; memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang bagi kemakmuran rakyat; memenuhi hak setiap warga negara

untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; serta memelihara fakir miskin dan anak terlantar. (Awang dalam Farid, 2019).

Suatu bentuk ekonomi rakyat yang mandiri tidak mengandalkan pasar global. Dalam sejarah bangsa versi Soekarno, bahwa kemerdekaan diambil dari ideologi pemikiran *non-cooperation*. Artinya suatu prinsip yang hidup, tidak mau bekerja bersama di atas segala lapajngan politik dengan kaum pertuanan, melainkan mendadakan suatu perlawanan dengan kaum pertuanan itu (Soekarno, 2005). Gagasan ini adalah pemikiran untuk merdeka tanpa ketertindasan “tuan”. Bagi Soekarno merdeka haru tanpa kerjasama. Pemikiran ini juga menjadi titik awal bahwa kemerdekaan dalam hal ekonomi harus mutlak dimiliki. Jika merujuk pemikiran tersebut, rakyat harus tidak bergantung dan hanya mengandalkan kekuasaan ekonomi global.

Ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai sistem kekuatan ekonomi rakyat yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi atau usaha secara swadaya dengan mengelola sumber daya ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah: (1) perekonomian disusun berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung dikuasai negara dan dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat (Baswir, 2014).

Landasan berfikir ekonomi kerakyatan ini yang sekarang menjadi diskusi publik, dibalik kuasa ekonomi kapital. Sejak reformasi, negara mulai mencetuskan kebijakan dalam mengimplementasikan hal tersebut dari lingkup desa. Kehadiran UU No 6 tahun 2014 tentang desa dijadikan titik awal kemandirian desa termasuk ekonomi. Masyarakat desa diarahkan dapat menyelenggarakan perekonomian secara mandiri.

Desa Pengalusan yang terletak di Kabupaten Purbalingga memiliki karakteristik yang cukup unik dalam hal ekonomi. Secara kultural masyarakat Desa Pengalusan memiliki potensi ekonomi yang sudah lama sejak bahkan sebelum orde baru, menjadi aktivitas rutin. Sebagian besar

masyarakat menjadi produsen gula jawa. Potensi sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi gula jawa di sini adalah pohon kelapa. Ketersediaan sumber daya ini yang sampai sekarang dimanfaatkan masyarakat.

Letak geografis desa tidak terlalu mendukung untuk menciptakan pertanian padi atau hasil pertanian *mainstream* lainnya. Letaknya berada di bawah kaki Gunung Slamet, sehingga tekstur tanah tidak rata. Pemanfaatan hasil pertanian lebih pada hasil perkebunan seperti kelapa, cengkeh dan kopi. Karakteristik masyarakat Pengalusan yang agraris ditunjukkan dengan konsistensi sumber pendapatan dari hasil alam.

Penelitian ini melihat bagaimana sebuah masyarakat desa telah keluar dari pakem ekonomi global secara pendapatan. Ekonomi kerakyatan hasil perumusan kebijakan negara telah terlihat sejak ideologi tersebut muncul. Keberadaan produksi hasil perkebunan ini menjadi kekutan lokal bagi kelas bawah untuk sedikit mandiri. Gula jawa yang diproduksi tidak sama dengan gula jawa di pasar, sehingga sampai sekarang banyak pedagang tidak meninggalkannya. Banyak pedagang atau konsumen memanfaatkannya sebagai “gula sumber” untuk dijadikan produk turunan yang lain. Penjelasan di bawah akan lebih menerangkan secara rinci bagaiman bisnis desa dapat secara mandiri bertahan dan ideologi kerakyatan dapat berjalan berkelanjutan.

Landasan Konseptual

Sejarah perekonomian Indonesia telah menunjukkan sebuah fakta dan analisa sosial, hukum dan ekonomi. Sejak reformasi kebijakan perundang-undangan mulai mencari formula untuk mencapai ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya, yang sebelumnya terhalangi oleh obsesi penguasa yang berlebihan. Setelah dengan dasar konstitusi dari UUD 1945 mensyaratkan untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan, lalu muncul UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Kebijakan ini mendukung agar masyarakat

dan daerah tidak lagi terpusat pada negara. Tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan pemenuhan derajat kehidupan dasar melalui pembangunan usaha ekonomi yang berskala kecil dan menengah (Saly, 2008).

Secara konstitusional, negara telah mencanangkan berbagai kebijakan dan program mencapai kemandirian ekonomi. Bagi akademisi definisi tidak akan cukup untuk melihat dan menganalisa sebuah fenomena. Satu konsep besar yang dapat dijadikan bahan rujukan adalah konsep sosial ekonomi dari Scott. Pada dasarnya ekonomi kerakyatan di Desa Pengalusan adalah perilaku pertanian masyarakat. Hasil olahan pertanian atau perkebunan masyarakat desa berupa gula jawa (sumber) memiliki jenis pengoalahan yang subsistensi. Perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani yang berorientasi subsistensi merupakan akibat dari kenyataan yang berbeda dengan perusahaan kapitalis dan merupakan satu unit konsumsi dan unit produksi (Scott, 1994).

Scott menganalisa jenis pertanian yang ada di Asia Tenggara dengan model subsistensi. Hasil panen jenis ini mengarah pada kultur tradisional yang dapat diandalkan, hanya satu kali mengalami “jatuh” pada tingkat subsistensi dan itu peluangnya hanya satu dari tiga puluh. Resiko terburuk terjadi suatu bencana dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang sudah dialami. Hasil analisa Scott tersebut setelah dilakukan penelitian di Asia Tenggara pada petani padi. Simpulan besarnya adalah bahwa petani dan keluarganya dapat hidup dengan mengandalkan pertanian tanpa ada campur tangan kapital, meskipun di atas mereka tangan-tangan penguasa masih bermain (Scott, 1994).

Kedadaan dan kondisi petani yang substensi dapat dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kerakyatan. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan metode pengentasan kemiskinan dengan program *financial inclusion*. Hal ini merujuk dari World Bank kepada negara-negara berkembang. Prinsip *inclusive financial* mengarah pada kajian dan kebijakan pada ekonomi inklusi yang merupakan bentuk ekonomi mikro yang pro

rakyat. Keuangan inklusif merupakan revisi ekonomi kerakyatan yang cacat saat orde baru dan pembangunan berbasis kapital. Dalam keuangan inklusif memiliki prinsip *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality* dan *framework* (Rizky dalam Farid, 2019).

Pembangunan ekonomi dari negara melalui proses yang panjang telah sampai pada tahap di mana masyarakat mampu menciptakan sistem ekonomi masing-masing. Merujuk pada pembangunan sosial Midgley, bahwa keterlibatan pemerintah yang luas dalam urusan sosial ekonomi membahayakan masyarakat. Meskipun pada abad 20, masyarakat miskin menginginkan intervensi pemerintah, namun bagi para ahli hal ini tidak begitu signifikan (Midgley, 2005).

Midgley mencontohkan bentuk pembangunan ekonomi di Delta Missisipi Amerika, yaitu masyarakat pedesaan tidak bergantung pada penciptaan lapangan kerja dari luar, yang dilakukan adalah memperbaiki sektor pertanian, pembangunan bisnis lokal dan sumber lain seperti pariwisata (Midgley, 2005). Bentuk pembangunan ekonomi ini hampir sama dengan masyarakat Desa Pengalusan di mana keberadaan investor luar tidak berpengaruh. Hasil *nderes* akan dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang berdampak pada harga jual. Hal ini yang dapat membuktikan harga jual gula jawa dari desa tidak ditentukan oleh makelar atau juragan.

Beberapa kerangka konseptual tersebut mengarahkan pada pola pemikiran bagaimana individu atau kelompok sosial kecil dapat *survive* secara mandiri. Bentuk bisnis desa yang dikelola pribadi di Desa Pengalusan adalah bentuk subsistensi dalam jangka panjang yang menunjukkan sebuah keterbukaan keuangan dan kemandirian ekonomi. Masyarakat tidak menunggu kebijakan keuangan negara atau naik turunnya nilai tukar rupiah. Masyarakat *pennderes* memiliki kebebasan sendiri untuk menentukan harganya.

Metodologi Penelitian

Hasil penelitian dan kajian ini diambil dari pendalaman data petani dan keluarganya. Sebagai petani gula jawa, waktu yang dimiliki mereka tidak dapat diprediksi. Dalam hal ini penulis harus menyesuaikan waktu setiap petani. Beberapa keluarga menjadi informan untuk mencapai sebuah hasil yang dapat mendukung fokus kajian tentang bisnis desa berupa pengolahan gula jawa.

Observasi adalah modal awal untuk mengerathui situasi dan kondisi masyarakat di lokasi penelitian. Dalam pengamatan awal, penulis berjalan berkeliling desa untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Hasil pengamatan dan observasi awal memberikan gambaran bahwa kondisi geografis Desa Pengalusan sebagian besar adalah wilayah perkebunan. Sebagian adalah perkebunan kelapa, kayu sengon dan jati, serta kebun cengkeh. Sebagian kecil lahan memiliki jenis pohon yang bervariasi.

Dalam rangka mengenali lokasi penelitian baik secara fisik maupun non fisik, observasi ini sudah sepatutnya dilakukan. Sebelum masuk lebih dalam ke informan penulis melakukan pendekatan kepada petani. Dengan pendekatan kepada petani sebagai informan adalah langkah awal sebagai peneliti untuk mendapatkan kedekatan personal. Setelah kedekatan itu didapatkan, besar kemungkinan data yang diperoleh setelahnya akan lebih valid. Berbeda jika proses ini tidak dilakukan, data yang diperoleh ada kemungkinan kurang valid. Bagi peneliti sosial, pendekatan dengan informan dianggap hal yang penting sebelum menuju pada proses wawancara yang mendalam.

Setelah mengetahui kondisi awal dengan observasi maka pertanyaan yang tidak mampu dijawab hanya dengan pengamatan maka dilakukan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan informan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, keberlangsungan metode wawancara mendalam sangat dibutuhkan. Sehingga dengan pemilihan informan yang tepat dapat mendukung data yang didapatkan. Beberapa

informan yang dipilih dari keluarga petani telah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis. Sehingga ketika waktu tersebut diberikan, penulis memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Gula jawa sebagai komoditas Desa Pengalusan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan sebagian besar masyarakat. Penulis melakukan observasi dan wawancara juga tidak hanya dengan petani gula jawa, tetapi beberapa stake holder desa juga diajak diskusi bagaimana perannya dalam pertanian ini. Selain itu, tokoh lokal yang sebagian juga menggarap gula jawa adalah informan dalam kajian ini.

Observasi dan wawancara secara bertahap dilakukan dalam mendalami fokus penelitian. Penulis tidak mengagendakan waktu tertentu atau menyusun jadwal wawancara dengan informan. Pertimbangannya selain karena ketidakpastian waktu petani, kondisi tempat tinggal penulis juga tidak jauh dari pusat pertanian Desa Pengalusan. Setelah data yang didapatkan dianggap cukup dengan fokus kajian, penulis mereduksi dan hasilnya dianalisa untuk mendapatkan simpulan dan benang merah tentang ekonomi kerakyatan dari bisnis desa.

Masyarakat Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga

Sebelum menjelaskan tentang petani gula jawa lebih dalam, sedikit dijelaskan tentang kondisi geografis dan administratif desa. Pada bagian ini akan disajikan beberapa data dasar Desa Pengalusan dan sedikit kondisi masyarakatnya. Desa Pengalusan terletak di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Agar memiliki gambaran geografis, diberikan data batas desa yaitu sebelah utara Desa Campakoah dan Sangkanayu, sebelah barat Desa Serang, sebelah selatan Desa Binangun, dan sebelah timur Desa Pagerandong. Data administratif lainnya adalah desa ini terdiri dari lima dudun, 3 RW dan 21 RT. Jumlah perangkat Desa Pengalusan adalah lima orang dan satu kepala desa.

Dalam dokumen data Kecamatan Mrebet 2014 Desa Pengalusan, memiliki luas tanah 390,348 Ha. Dari luas tersebut, 168,350 Ha digunakan untuk pemukiman warga, 38,334 Ha berupa sawah tadah hujan, 180,664 Ha berupa tegalan dan sisanya 3,04 Ha belum digunakan. Jadi dari total luas wilayah Desa Pengalusan, masih ada lebih dari 50% yang tidak dijadikan pemukiman warga. Artinya, luas wilayah perkebunan dan pertanian masih menjadi wilayah terluas dibandingkan tempat tinggal.

Dengan luas tersebut di atas, masyarakat Desa Pengalusan berjumlah 5.948 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3.001 orang laki-laki dan 2.942 orang perempuan. Dari jumlah tersebut terbagi ke dalam 1.979 KK. Dalam hal mata pencaharian, terdapat beberapa jenis yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Jenis Pekerjaan	Jumlah
PNS	27
Pengusaha	66
Pedagang	378
Petani	781
Buruh tani	1.118
Buruh industry	534
Buruh bangunan	288
Tni	1
Angkutan	95
Tki	7
Pensiunan	9

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Lainnya	1.437
Tidak bekerja	1.207
Total	5.948

Sumber: Kecamatan Mrebet Dalam Angka 2014)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah terbesar adalah jenis pekerjaan petani dengan jumlah 1899 orang, mulai dari petani (pemilik lahan) dan buruh tani. Perbedaan keduanya akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Tidak salah jika sebagian besar wilayah desa menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Selain itu, kondisi bahwa masyarakat Desa Pengalusan banyak berprofesi sebagai petani, didukung dengan kondisi alam yang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan.

Dalam hal fasilitas pendidikan dan kesehatan, Desa Pengalusan dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut didukung dengan empat Sekolah Dasar (SD) dan satu TK. Dengan satu puskesmas desa (puskesmas pembantu) sudah cukup membantu masyarakat desa dalam melakukan pelayanan kesehatan. Segi pendidikan dan kesehatan dengan kondisi tersebut dapat menjadi dasar bahwa tersedia fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ketika selesai dari jenjang SD, biasanya siswa melanjutkan di SMP yang terletak di tetangga desa yang masih dalam lingkup Kecamatan Mrebet.

Sebagai etnis Jawa, masyarakat desa dalam melakukan interaksi menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan di Desa Pengalusan yang termasuk dalam wilayah Purbalingga dengan logat *ngapak*. Bagi masyarakat Banyumasan, logat tersebut telah ada sejak lama. Dialek *ngapak* agak berbeda dengan Bahasa Jawa logat Solo dan Yogyakarta yang bagi publik itu adalah Jawa yang “halus”.

Dialek *ngapak* Banyumasan berasal dari bahasa Jawa kuno, Jawa pertengahan, Sunda kuno, dan Sunda. Dialek bahasa ini adalah hasil kontak antarbudaya sejak Majapahati. Letaknya yang diapit oleh Jogja (Jawa asli) dan Sunda menjadikan resisten pada tingkatan bahasa dan budaya dinasti

Mataram Islam, dan karena juga mereka merasa keturunan Majapahit. Bahasa Jawa Pertengahan yang berkembang dari masa akhir Majapahit tidak mengenal strata bahasa sehingga bahasa tersebut lebih egaliter daripada bahasa Jawa baku (Poedjosoedarmo dalam Trianton, 2016).

Ketika dalam hal bahasa masyarakat Pengalusan memiliki ciri khas, dalam hal kepercayaan mereka cenderung agak sama dengan masyarakat lain. Terdapat dua keyakinan besar yang ada di Pengalusan yakni Agama Islam dan Kristen. Seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat muslim di Pengalusan memiliki jumlah yang lebih besar daripada Kristiani.

Jika merujuk pada unsur kebudayaan, satu hal lagi yang perlu diberikan gambaran yakni tentang kesenian masyarakat. Satu kesenian yang masih ada hingga sekarang adalah kesenian kuda lumping yang dikenal dengan nama *ebeg*. Bagi masyarakat desa, *ebeg* memiliki nilai kultural cukup tinggi. Sebagai kesenian khas, masyarakat menganggap *ebeg* sebagai bentuk konstruksi budaya komunal. *Ebeg* akan menjadi simbol dalam upacara adat atau kegiatan tertentu. Selain simbol acara hajatan masyarakat, seseorang juga akan menggelar pertunjukan *ebeg* sebagai rasa syukur atau menunjukkan eksistensi dan kuasanya.

Usaha Gula Jawa Khas Desa Pengalusan

Sebelumnya perlu diketahui bahwa penjelasan tentang sebagian besar masyarakat Desa Pengalusan berprofesi sebagai petani *nderes* adalah bukan berarti bentuk homogenitas mata pencaharian. Jenis profesi selain petani *nderes* juga menjadi tumpuan ekonomi masyarakat seperti pedagang, buruh bangunan, dan profesi kelas menengah ke atas meskipun jumlahnya lebih sedikit. Sebagai jenis profesi mayoritas, *nderes* seolah menjadi kulltur bagi masyarakat Desa Pengalusan. Pada bagian ini akan dijelaskan secara teknis mekanisme pengolahan gula jawa dan fakta sosial lain yang berkaitan dengan bisnis atau usaha gula jawa sebagai sumber mata pencaharian masyarakat.

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pendalaman data kepada petani *nderes*, proses mekanisme produksi gula jawa Pengalusan dapat

digambarkan sebagai berikut. Pertama, seorang petani *nderes* yang biasanya laki-laki setiap hari (biasanya pagi) melakukan proses pencarian bahan baku dari pohon kelapa. Proses pengambilan bahan baku ini biasanya dilakukan selama kurang lebih 5 jam. Teknisnya adalah seorang petani meninggalkan wadah yang dinamakan *pongkor* (bambu yang dipotong satu ruas) atau menggunakan ember kecil. Setelah satu malam wadah tersebut akan diambil esok harinya. Bagian pohon kelapa yang diambil adalah dari air nira kelapa bersumber dari calon *bluluk*. Pohon kelapa yang sudah diambil air nira nya, tidak akan bisa tumbuh buah kelapa selamanya. Dengan kata lain pohon kelapa tersebut tidak dapat berproduksi lagi jika telah dialihfungsikan menjadi bahan baku gula jawa.

Kedua, setelah air nira dikumpulkan dari beberapa pohon kelapa (setiap pagi), seorang petani akan membawanya ke rumah untuk kemudian di olah. Pada bagian pengolahan biasanya dilakukan oleh seorang istri. Pengolahan tersebut biasanya dilakukan di *tungku* (kompor kayu). Awalnya, air nira dikumpulkan menjadi satu dalam wajan besar. Air nira yang sudah terkumpul dicampur dengan kapur sirih. Setiap satu wajan besar kapur sirih yang harus dicampurkan sebanyak satu gayung kecil. Setelah api menyala, proses produksi dimulai dengan kondisi api tidak boleh mati, atau dengan kata lain istri penderes tidak boleh meninggalkan tempat.

Proses pengolahan gula jawa biasanya berlangsung selama 5 jam. Setelah adonan tersebut mulai mendidih, proses selanjutnya adalah diaduk sampai bentuknya agak mengental. Proses pengadukan tersebut dilakukan kurang lebih satu jam dengan cara pengadukan perlahan. Setelah adonan tersebut agak mengental (seperti karamel), barula proses pencetakan dapat dimulai. Proses pencetakan dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam setiap cetakan yang dikenal dengan istilah *sengker* (irisian bambu tipis yang dibentuk lingkaran) atau menggunakan *batok* kelapa. Setelah cetakan semua terisi satu persatu, gula jawa harus didiamkan selama 1-2 jam hingga mengeras. Jika gula jawa sudah mengeras, kemudian dikemas ke dalam plastik untuk dijual.

Proses dari awal sampai dihasilkan gula jawa tersebut dilakukan setiap hari oleh petani *nderes* untuk memenuhi kebutuhan. Setiap hari, petani menghasilkan gula jawa sebanyak 20-30 kg, ada sebagian dari total hasil produksi tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi. Hasil tersebut didapatkan dari pohon kelapa yang dimiliki di lahannya. Setiap petani biasanya membutuhkan 80-100 pohon kelapa untuk dapat melangsungkan bisnis gula jawa. Jika jumlah tersebut belum muncukupi di lahan milik pribadi, seorang petani akan menggunakan pohon kelapa di lahan milik orang lain. Sistem yang disepakati jika pohon itu di lahan orang lain adalah sewa. Pembayaran diberikan kepada pemilik lahan setiap hari pasaran *pahing* atau *kliwon* tergantung dari kesepakatan awal. Setiap pohon dipatok dengan harga sekitar seribu.

Selanjutnya hasil dari pengolahan gula jawa tersebut dijual ke pengepul atau ke pasar. Mereka biasanya tidak akan menjual satuan atau per kilo. Prosesnya adalah setiap petani memiliki pengepul yang berbeda, biasa per RT atau dusun. Ada juga yang menjual ke pasar, itu pun ke pengepul yang ada di pasar desa. Kemudian pengepul tersebut yang mendistribusikan ke pedagang yang selanjutnya bisa diperjualbelikan untuk kebutuhan rumah tangga.

Setiap pengepul di dusun atau RT, biasanya sanggup memberikan jasa pinjaman kepada petani *nderes* berupa uang tunai. Jumlahnya tergantung kebutuhan petani. Biasanya seorang petani akan memohon pinjaman kepada pengepul sebelum usaha atau bisnis gula jawa dimulai sebagai modal awal untuk menyediakan peralatan. Selain untuk modal awal, petani *nderes* juga biasanya meminjam setelah memproduksi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mekanisme pembayaran pinjaman tersebut dibayarkan atau diangsur saat penjualan hasil gula jawa. Bunga pinjaman yang diberikan ke petani biasanya sekitar 5-10% tergantung kesepakatan masa waktu pengembalian pinjaman. Jadi, sebenarnya proses pinjam meminjam ini juga dapat dilihat sebagai pengikat jaringan para petani kepada seorang pengepul agar petani tidak menjual hasil gula jawa ke pengepul lain.

Mekanisme teknis tersebut setidaknya memberikan gambaran bahwa masyarakat Desa Pengalusan memiliki produk potensi lokal yang dapat menumbuhkan kemandirian. Dari hasil pengamatan dan keterangan pedagang bahwa gula jawa hasil produksi desa tersebut adalah produk unggulan yang dapat diturunkan atau diolah kembali menjadi gula jawa sumber atau produk olahan yang lainnya. Sehingga dengan realitas tersebut, simpulan awalnya adalah masyarakat Desa Pengalusan telah memiliki kearifan ekonomi lokal yang cukup khas terkait dengan usaha masyarakat desa yang khas.

***Nderes* Sebagai Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan Dari Desa**

Merujuk pada konsep Scott dalam bukunya *Moral Ekonomi Petani*, bahwa terdapat ke-khasan perilaku ekonomi keluarga petani yang berorientasi subsistensi merupakan akibat dari kenyataan yang berbeda dengan perusahaan kapitalis dan merupakan satu unit konsumsi dan unit produksi (Scott, 1994). Realitas sosial tersebut sedikit menjawab tantangan publik untuk tidak selalu tunduk pada kuasa kapital yang mengeksploitasi tenaga manusia. Berbeda dengan tenaga pabrik atau perusahaan yang menggantungkan diri pada kebutuhan pasar kapital, petani *nderes* yang subsisten telah mampu melawan ideologi ketergantungan dan sanggup mandiri secara ekonomi.

Hasil kajian Scott tentang petani di Asia Tenggara menunjukkan bahwa petani subsisten banyak yang terpaksa menjual aset kepemilikan kepada masyarakat kelas atas demi memenuhi kebutuhan dan berjalannya sebuah usaha pertanian. Ketika keadaan mendesak karena kebutuhan semakin meningkat petani akan selalu sepatat dengan upah yang diberikan (Scott, 1994). Meskipun demikian, postulat pertama Scott bahwa petani subsisten berani keluar dari kuasa kapital merupakan bentuk yang dilakukan petani *nderes* telah dilakukan sejak lama. Sehingga meskipun ada realitas lain seperti lingkaran hutang/pinjaman pengepul tidak sampai pada titik petani harus tunduk pada harga yang ditentukan pengepul atau pasar.

Harga gula jawa tidak ditentukan oleh pasar atau pengepul. Berbeda dengan petani padi atau jagung yang harus mengikuti harga pasar yang ditentukan bulog atau negara. Petani *nderes* di Pengalusan memiliki kuasa penuh atas harga. Biasanya harga mengacu pada musim kemarau dan penghujan. Saat musim kemarau, air nira yang dihasilkan lebih banyak, sehingga produksi gula jawa dapat meningkat yang menyebabkan harga gula jawa cenderung menurun. Namun saat musim penghujan datang, air nira yang dihasilkan lebih sedikit sehingga produksi menurun dan menyebabkan harga gula jawa bisa naik.

Selain faktor cuaca tersebut petani *nderes* juga menghadapi faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong diantaranya adalah (1) jumlah pohon kelapa di desa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi, (2) ada keinginan petani bekerja di daerah sendiri atau tidak tertarik pada iming-iming kesejahteraan di kota, (3) bagi sebagian besar masyarakat desa memiliki kemampuan untuk bisa mengambil air nira dari pohon kelapa yang tinggi, (4) keadaan ekonomi keluarga yang memaksa atau kondisi ekonomi yang menjanjikan dari usaha gula jawa.

Di balik faktor pendorong, terdapat faktor penghambat yang setidaknya sedikit mengganggu petani seperti kondisi cuaca saat musim penghujan dan terkadang pengepul memberikan harga lebih rendah daripada harga yang diinginkan oleh petani. Hal ini dikarenakan kadang petani tidak memenuhi kesepakatan saat memohon pinjaman, sehingga atas ketidak disiplinannya petani tersebut pengepul menurunkan harga sebagai konsekuensi mundurnya pelunasan pinjaman.

Kedua faktor tersebut dapat berdampak pada petani yang mempengaruhi hasil produksi gula jawa. Terlepas dari faktor penghambat, kultur *nderes* telah menunjukkan pembangunan sosial ekonomi yang berasal dari desa. Hal ini meskipun belum terlalu berdampak besar, dapat mendekonstruksi beberapa teori pembangunan. Teori modernisasi pembangunan menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan dengan standar Eropa dalam waktu yang lama. Teori dependensi mengatakan bahwa setelah terjadi pembangunan di negara miskin dan berkembang, negara tersebut akan sangat tergantung dengan negara maju karena kebutuhan pembangunan berasal dari negara maju (Jamaludin, 2016).

Berbeda dengan konsep pembangunan tersebut, konsep pembangunan sosial akan lebih sesuai dengan realitas kemandirian ekonomi Desa Pengalusan. Dalam penjelasannya, Midgley menerangkan keterlibatan pemerintah yang luas dalam urusan sosial ekonomi membahayakan masyarakat. Meskipun pada abad 20, masyarakat miskin menginginkan intervensi pemerintah, namun bagi para ahli hal ini tidak begitu signifikan (Midgley, 2005). Artinya keterlibatan pemerintah dalam tataran ekonomi lokal dianggap tidak berjalan dengan baik. Pembangunan sosial menuntut masyarakat desa harus dapat mensejahterakan dirinya sendiri dengan potensi yang dimiliki.

Kemampuan masyarakat Desa Pengalusan untuk memproduksi gula jawa merupakan wujud pembangunan sosial pada tingkat desa menuju ekonomi kerakyatan. Mereka tidak memiliki keinginan untuk mengikuti arus global yang menjadikan banyak masyarakat tergantung pada ekonomi kapital. Memilih untuk mengolah potensi lokal berupa gula jawa minimal dapat menunjukkan kuasa orang desa melawan kuasa global.

Kebiasaan petani *nderes* yang bagi sebagian orang hanya dilihat sebagai jenis bisnis atau usaha biasa, sebenarnya dapat dilihat sebagai dukungan orang desa mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kebijakan negara dengan memunculkan otonomi daerah dengan UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah harus juga didukung dengan kemandirian ekonomi. Tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah membantu masyarakat miskin meningkatkan pemenuhan kehidupan dasar melalui pembangunan usaha ekonomi yang berskala kecil dan menengah (Saly, 2008). Sehingga tidak salah jika usaha gula jawa dari petani ini adalah wujud pembangunan usaha ekonomi yang mendukung kebijakan ekonomi kerakyatan.

Wujud kebijakan negara yang lain terkait dengan ekonomi kerakyatan adalah *financial inclusion*. Hal ini merujuk dari World Bank kepada negara-negara berkembang. Prinsip *inclusive financial* mengarah pada kajian dan kebijakan pada ekonomi inklusi yang merupakan bentuk ekonomi mikro yang pro rakyat. Dalam keuangan inklusif memiliki prinsip *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality*, dan *framework* (Rizky dalam Farid, 2019). Beberapa prinsip keuangan terbuka tersebut telah dimiliki oleh petani *nderes*. Kepemimpinan,

inovasi, pemberdayaan, pengetahuan dan lainnya telah diterapkan dalam metode produksi dan aktivitas seputar usaha gula jawa. Inovasi dan pemberdayaan terlihat dari bagaimana masyarakat desa mampu menciptakan ruang ekonomi baru yang tidak tergantung pada ekonomi global. Kepemimpinan dan pengetahuan petani yang diperankan oleh bapak (kepala rumah tangga) dapat mengatur sedemikian rupa, sehingga bisnis atau usaha ini dapat berjalan dengan baik.

Akhirnya, sebuah ruang ekonomi baru dapat tercipta. Ruang di mana masyarakat telah menunjukkan kemerdekaan dan kemandirian dalam hal ekonomi. Negara dan pemerintah setidaknya tidak banyak ikut campur sampai pada tingkatan lokal (desa). Lebih dari itu, realitas keluarga petani di Pengalusan tidak pula bergantung pada kebijakan desa. Relasi petani dengan pengepul, meskipun ada ikatan pinjaman merupakan relasi patron-klien yang tidak terlalu membebani keduanya. Dengan begitu, visi ekonomi kerakyatan negara dapat didukung oleh kuasa pengaturan dan pengelolaan ekonomi petani yang berasal dari sebuah usaha atau bisnis lokal yang berbentuk gula jawa.

Simpulan

Masyarakat Desa Pengalusan telah sejak lama melakukan produksi gula jawa. Sebagian besar masyarakat desa berprofesi sebagai petani *nderes* dengan pembagian kerja laki-laki (suami) sebagai pencari air nira dan perempuan (istri) sebagai pengolah bahan baku menjadi gula jawa. Gula jawa yang dihasilkan adalah gula jawa yang dapat menjadi bahan olahan gula jawa turunan atau makanan lain dengan kualitas unggul. Mekanisme pengolahan dan rantai ekonomi petani *nderes* telah berjalan cukup lam apula. Skema yang digunakan adalah petani menjual ke pengepul dengan harga yang disepakati. Petani yang membutuhkan pinjaman ke pengepul biasanya menggunakan metode pembayaran setiap kali menjual gula jawanya. Penjualan tersebut dilakukan setiap hari, sehingga dari usaha dan bisnis yang dijalankan sehari-hari ini dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga dapat terpenuhi dari hasil memproduksi gula jawa. Sebagai profesi dominan, hal ini dapat mendukung kebijakan ekonomi

kerakyatan yang telah sejak lama direncanakan dengan segala dinamikanya. Selain itu, ekonomi kerakyatan desa ini juga dapat mendukung jalannya otonomi daerah (desa) yang telah berjalan beberapa tahun. Dalam hal ini masyarakat bukan membangun fisik atau infrastruktur desa, melainkan telah membangun kemandirian ekonomi yang tidak memberatkan keuangan desa dan negara.

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrison. 2014. "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Indonesia" dalam *Ekonomi Kerakyatan American Institute For Indonesian Studies (AIFIS)* oleh Lembaga Suluh Nusantara.
- Farid, Masdar. 2019. "Menakar Ulang Ekonomi Kerakyatan Pulau Padang, Riau" dalam *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, edisi Vol. 3, No. 1, 2019. Malang: FISIP UB.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016. *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Islam Depag RI.
- Saly, Jeane Neltje. 2008. *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI.
- Scott, James. 1994. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Soekarno. 2005. *Di Bawah Bendera Revolusi (Cetakan Kelima)*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Tim Penyusun. 2014. *Kecamatan Mrebet Dalam Angka 2014*, Purbalingga: BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.
- Trianton, Teguh. 2016. "Bahasa sebagai Identitas dan Perlawanan Kultural Masyarakat Banyumas Pascakolonial", Makalah Seminar Internasional Indonesia "Art and Urban Culture" yang diselenggarakan oleh FIB UNS, Oktober 2016. Surakarta: UNS.